



## Pendampingan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Aplikasi Sigap di Desa Along dan Mutiara

Yudha Anata S<sup>1</sup>, Raisatul Afra<sup>2\*</sup>, Afrijal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: raisatulafra@gmail.com

### Info Artikel

**Diajukan:** 16-01-2026

**Diterima:** 24-02-2026

**Diterbitkan:** 31-03-2026

**Keywords:**

Data Management; SIGAP Application; Village Digitalization.

**Kata Kunci:**

Pengelolaan Data, Aplikasi SIGAP, Digitalisasi Desa.

### Abstract

*This community service activity aimed to enhance the capacity of village officials in managing gampong data through the SIGAP (Sistem Informasi Gampong) application in Along and Mutiara Villages, Salang District, Simeulue Regency. Key challenges included low digital literacy, unstructured data management, and irregular data updates. This community service activity employed a capacity-building approach to strengthen the capabilities of village officials in supporting the implementation of e-government through the SIGAP application. The program consisted of a three-day training session followed by 45 days of intensive technical assistance. The training focused on introducing SIGAP features, managing population data, village profiles, and administrative services. The results of the activity indicate an increase in the apparatus' understanding of the SIGAP application, where comprehension of its functions and utilization rose from 44% to 88%, while the operators' ability in data input improved from 13% to 100% after the activity. The optimized use of SIGAP improved administrative efficiency, data accuracy, and public service delivery at the village level, emphasizing the importance of continuous assistance for successful digital governance in rural areas.*

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data gampong melalui aplikasi SIGAP di Desa Along dan Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi digital, pengelolaan data yang belum terstruktur, serta pembaruan data yang tidak rutin. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *capacity building* untuk memperkuat kemampuan aparatur desa dalam mendukung implementasi *e-government* melalui aplikasi SIGAP. Program dilaksanakan melalui pelatihan selama tiga hari dan pendampingan teknis selama 45 hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur terhadap aplikasi SIGAP, di mana pemahaman fungsi dan pemanfaatannya naik dari 44% menjadi 88%, serta kemampuan operator dalam penginputan data meningkat dari 13% menjadi 100% setelah kegiatan. Pemanfaatan SIGAP secara optimal meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik, serta menegaskan pentingnya pendampingan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



---

berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

---

## Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan paling dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya, yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, melayani, dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal (Sugiman, 2018).

Seiring berkembangnya era digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan sistem yang lebih modern, cepat, dan transparan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan ketentuan hukum tersebut adalah pengembangan *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kinerja pemerintah, memperluas akses informasi, serta memperkuat prinsip *good governance*.

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi pemerintahan desa di Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DISKOMINSA) Aceh mengembangkan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gampong). Berdasarkan penjelasan dari DPMG Aceh, SIGAP merupakan aplikasi yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan data terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan di seluruh gampong di Aceh. Aplikasi ini diharapkan menjadi basis bagi perencanaan dan penganggaran berbasis data yang dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa (DPMG Aceh, 2021).

Meskipun aplikasi SIGAP telah diluncurkan dan disosialisasikan di berbagai kabupaten di Aceh, penerapannya di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya literasi digital dan kemampuan teknis aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi, ketidakteraturan pengelolaan data, serta minimnya pembaruan data secara berkala. Situasi ini juga terjadi di Desa Along dan Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, yang menjadi lokasi pengabdian. Keterbatasan pemahaman operator menyebabkan data desa tidak terkelola dengan baik dan masih tersimpan secara acak, sehingga menyulitkan proses perencanaan, pelaporan, dan penyediaan informasi yang akurat bagi pemerintah desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SIGAP tidak hanya terletak pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Dalam konteks ini, pendekatan *capacity building* menjadi relevan sebagai kerangka penyelesaian



masalah. Grindle (1997), sebagaimana dikutip dalam Hapsari (2021) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas merupakan upaya untuk mengembangkan berbagai strategi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja organisasi sektor publik. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu dan sumber daya secara optimal, efektivitas merujuk pada kesesuaian upaya dengan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan responsivitas menekankan keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan organisasi. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas difokuskan pada peningkatan kemampuan organisasi publik melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, serta perbaikan sistem dan prosedur kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa Universitas Syiah Kuala dirancang untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada aparatur Desa Along dan Desa Mutiara, Kabupaten Simeulue, dalam memanfaatkan aplikasi SIGAP. Upaya ini diarahkan untuk membantu aparatur desa memahami fungsi dan alur kerja aplikasi, meningkatkan keterampilan teknis dalam melakukan input serta pembaruan data, serta menata kembali sistem pengelolaan data yang sebelumnya tidak teratur. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan teknis, tetapi juga membangun kemampuan aparatur desa dalam mengelola data secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan nyata dalam tata kelola data gampong di Desa Along dan Desa Mutiara. Aparatur desa diharapkan mampu mengoperasikan SIGAP secara lebih percaya diri, memahami pentingnya data yang akurat, serta melakukan pembaruan data secara berkala tanpa ketergantungan pada pihak luar. Optimalnya pemanfaatan SIGAP juga diharapkan dapat mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat proses pelayanan publik, serta menyediakan landasan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Dalam jangka panjang, model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di desa-desa lain di berbagai wilayah Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi *e-government* dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

## Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *capacity building* untuk memperkuat kemampuan aparatur desa dalam mendukung implementasi *e-government* melalui aplikasi SIGAP. Pendekatan ini menempatkan aparatur desa sebagai subjek aktif yang terlibat secara partisipatif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengabdian. Subjek pengabdian adalah aparatur desa yang bertugas sebagai operator aplikasi SIGAP di Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 peserta yang berasal dari seluruh



desa di kecamatan tersebut. Sebagai bagian dari proses evaluasi awal dan akhir kegiatan, tim pengabdian juga memberikan angket kepada seluruh 16 peserta untuk mengukur tingkat pemahaman, keterampilan, serta perubahan kapasitas mereka sebelum dan sesudah pendampingan. Lokasi pengabdian meliputi Desa Along dan Desa Mutiara sebagai wilayah sasaran utama pendampingan intensif.

Tahap perencanaan dilakukan melalui observasi awal dan identifikasi kebutuhan untuk mengetahui tingkat pemahaman, kendala teknis, serta pola pengelolaan data desa yang telah berjalan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan dan strategi pendampingan yang relevan dengan kebutuhan aparatur desa. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas operator desa dalam memahami prosedur operasional aplikasi SIGAP, mengenali fitur-fitur utama, serta mampu melakukan pengelolaan dan pembaruan data desa secara akurat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama berupa pelatihan umum yang dilaksanakan selama tiga hari dan berlokasi di Kantor Camat Salang. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi mengenai kebijakan digitalisasi pemerintahan desa, pengenalan aplikasi SIGAP, alur pengelolaan data gampong, pentingnya validitas dan pembaruan data, serta praktik langsung penggunaan aplikasi menggunakan laptop masing-masing peserta. Tahap ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar operator desa.

Tahap kedua berupa pendampingan teknis intensif yang dilaksanakan selama 45 hari di masing-masing desa. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan bimbingan langsung terkait proses input dan verifikasi data, penataan kembali data administrasi desa yang belum terkelola dengan baik, serta penyusunan alur kerja sederhana guna mendukung pembaruan data secara mandiri. Pendekatan pendampingan ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih kontekstual, intensif, dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi aparatur desa, sehingga diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis digital secara berkelanjutan.

Tabel 1. Jadwal dan Materi Pelatihan Penggunaan SIGAP Bagi Aparatur Desa

No	Hari	Materi Pelatihan	Uraian Materi Pelatihan
1	Hari ke-1 25 Agustus 2025	Pengenalan SIGAP dan Akun Operator	Penjelasan fungsi SIGAP, struktur menu, akses login, jenis data yang dikelola, serta kebijakan umum data desa.
2	Hari ke-2 26 Agustus 2025	Pengelolaan Data Kependudukan & Profil Gampong	Praktik input data penduduk (KK dan individu), validasi data, perbaikan data duplikat, pengelompokan data, serta pengisian profil desa.
3	Hari ke-3 27 Agustus 2025	Penggunaan Fitur Layanan Administrasi &	Latihan mengoperasikan menu layanan (surat menyurat, data aset, layanan dasar),



		Pembaruan Data Berkala	penyimpanan data, dan penyusunan alur pembaruan data rutin.
--	--	------------------------	---

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi awal, kemampuan aparatur desa dalam mengelola aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) masih tergolong rendah, baik dari aspek pemahaman fitur, ketepatan penginputan data, maupun konsistensi pemutakhiran informasi. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya data yang tidak terinput secara lengkap, keterlambatan pembaruan data gampong, serta minimnya pemanfaatan fitur SIGAP yang telah tersedia. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan data gampong dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

Kegiatan pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan data gampong di Desa Along dan Desa Mutiara bertujuan untuk memastikan kantor desa memiliki SDM yang mumpuni, terampil, dan mampu mengelola pengembangan sistem informasi secara mandiri. Selain itu, pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan era digital yang semakin pesat di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam pelayanan publik (Dan & Ipteks, 2022).

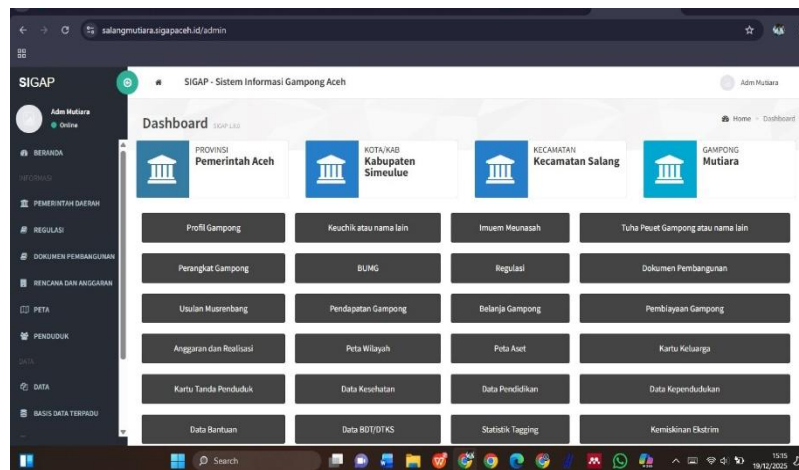
Pelatihan secara umum mengenai penggunaan aplikasi SIGAP dilaksanakan di Aula Kantor Camat Salang pada 25–27 Agustus 2025 dengan melibatkan aparatur desa se-Kecamatan Salang serta mahasiswa sebagai fasilitator. Pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan administrasi gampong berbasis digital. Dalam kajian administrasi publik, pelatihan terbukti berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta kemampuan aparatur dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat (Mendrofa et al., 2023).



Gambar 1. Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIGAP Bagi Aparatur Desa

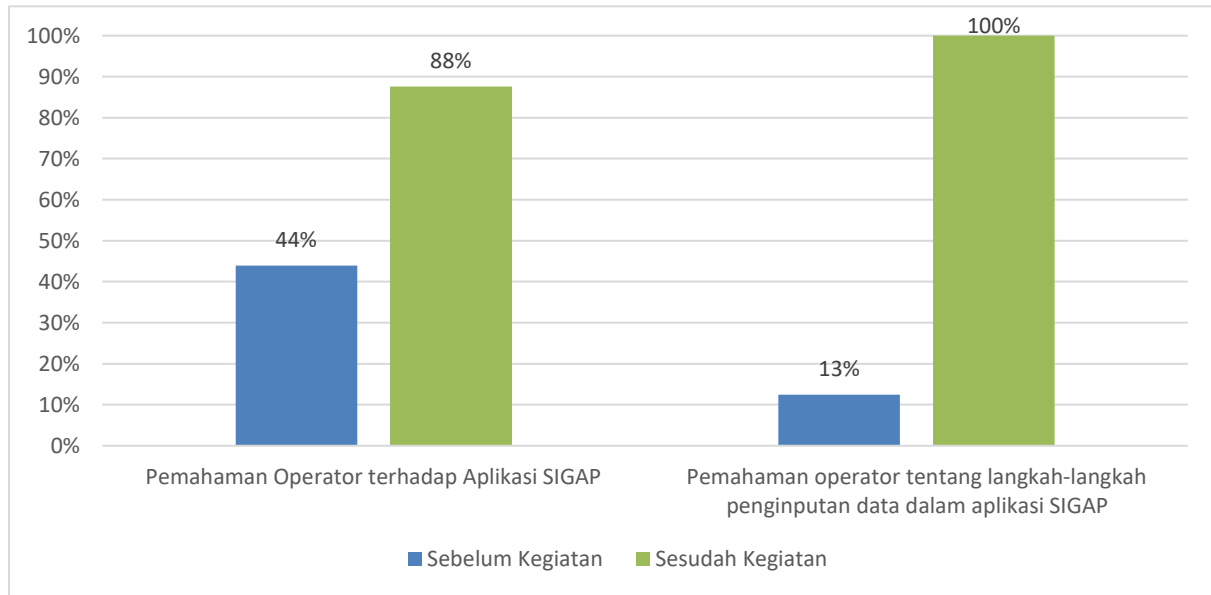


Materi pelatihan difokuskan pada penguatan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi SIGAP sebagai sistem informasi resmi. Fitur yang diperkenalkan meliputi pengelolaan data kependudukan, pembaruan profil gampong, pengelolaan layanan administrasi desa, serta proses penginputan dan validasi data secara berkala. Pengenalan tampilan antarmuka dan struktur menu SIGAP dilakukan untuk membantu aparatur desa memahami alur penggunaan sistem sebelum mengoperasikannya secara mandiri.



Gambar 2. Tampilan Menu Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gampong)

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap fungsi dan pemanfaatan aplikasi SIGAP. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil angket yang disebarakan kepada aparatur desa peserta pelatihan. Sebelum pelatihan dilaksanakan hanya 44% responden yang memahami fungsi dan pemanfaatan aplikasi SIGAP. Setelah pelatihan berlangsung tingkat pemahaman tersebut meningkat menjadi 88% responden. Selain itu pemahaman operator desa mengenai prosedur penginputan data dalam aplikasi SIGAP juga mengalami peningkatan signifikan dari 13% sebelum pelatihan menjadi 100% setelah pelatihan. Aparatur desa mulai mampu melakukan penginputan dan pembaruan data gampong secara lebih terstruktur serta memahami peran SIGAP dalam mendukung administrasi dan pelayanan publik desa. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan berfungsi sebagai fondasi awal dalam memperkuat kapasitas aparatur desa untuk beradaptasi dengan sistem administrasi berbasis digital (Nursetiawan et al., 2024).



Gambar 3. Hasil angket

Untuk memastikan keberlanjutan hasil pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan operator dalam pengelolaan data SIGAP. Pendampingan dilakukan secara lebih intensif untuk membantu aparatur desa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh ke dalam praktik pengelolaan data kependudukan dan administrasi gampong secara konsisten. Pendekatan pendampingan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi teknis aparatur desa serta membiasakan penggunaan sistem informasi secara sistematis (Hidayat et al., 2021; Ula et al., 2023).

Melalui proses pendampingan, aparatur desa didorong untuk melakukan input, verifikasi, dan pembaruan data kependudukan serta administrasi gampong secara berkala sesuai kondisi lapangan. Data yang terkelola dengan baik selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan administrasi, penyusunan laporan, dan penyediaan informasi desa yang akurat dan mutakhir. Meskipun demikian, temuan observasi menunjukkan pendampingan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan akses internet dan proses adaptasi aparatur desa terhadap teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi desa tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang memadai (Hidayatullah & Pratama, 2025).



Gambar 4. Pendampingan Operator Desa dalam Pengelolaan Data SIGAP



Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap tata kelola administrasi gampong di Desa Along dan Desa Mutiara. Dalam kurun waktu 45 hari, data kependudukan dan profil gampong berhasil dialihkan dari sistem manual ke sistem digital melalui aplikasi SIGAP. Aparatur desa juga telah mampu melakukan pengelolaan data secara mandiri, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Dalam perspektif *capacity building*, hasil kegiatan ini menguatkan pandangan Grindle (1997) sebagaimana dikutip dalam Hapsari (2021) bahwa pengembangan kapasitas mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas organisasi sektor publik. Peningkatan efisiensi tercermin dari perubahan pola kerja aparatur desa dari pengelolaan arsip manual menuju sistem berbasis digital. Efektivitas terlihat dari kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan memperbarui data sesuai tujuan penyediaan informasi gampong yang akurat dan mutakhir, sementara responsivitas ditunjukkan melalui meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam menyesuaikan pengelolaan data dengan kebutuhan pelayanan administrasi desa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi SIGAP oleh mahasiswa menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis aplikasi ini dapat diterapkan dengan baik di Desa Along dan Desa Mutiara setelah dilakukan beberapa penyesuaian sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal dalam mendukung pelayanan serta meningkatkan keterampilan aparatur desa yang mengoperasikannya. Selain itu, pendampingan ini juga berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam mengelola serta memanfaatkan aplikasi SIGAP, yang terlihat dari adanya peningkatan kemampuan peserta terhadap materi yang diberikan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan operator pengisian data SIGAP. Penulis memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa beserta aparatur gampong atas dukungan, akses data, dan kesempatan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada para operator SIGAP atas partisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan dan diskusi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh atas arahan, fasilitasi, serta dukungan kebijakan yang sangat membantu kelancaran kegiatan ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Syiah Kuala (USK) atas dukungan akademik, fasilitas, dan bimbingan yang telah menunjang keberhasilan pendampingan. Tidak lupa, terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing



akademik, rekan sejawat, dan seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan serta penyempurnaan tulisan ini. Semoga kontribusi yang telah diberikan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi gampong secara berkelanjutan.

### Daftar Rujukan

- Dan, J. I., & Ipteks, P. (2022). *Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*. 10(2), 236–248. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. (2021). *Pemerintah Aceh Akan Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Gampong*. <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ksdattg/aplikasi-sigap-akan-segera-di-launching>
- Hapsari, R. A. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>
- Hidayat, I., Andiriyanto, A., & Firmansyah, I. D. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Arsip di Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(1), 30-35. <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.1150>
- Hidayatullah, A., & Pratama, I. N. (2025). *Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Inovasi Layanan Publik Berbasis Smart Village di Kabupaten Lombok Barat Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*. 352–360. <https://www.ejurnal.teras.kampus.id/index.php/simetris/article/view/463>
- Mendrofa, Y. F. J., Lase, D., Waruwu, S., & Mendrofa, S. A. (2023). Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 11-21. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v1i1.5>
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Nurdin, A., Anwar, R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). *Pelatihan Digital Leadership Bagi Perangkat Desa Di Desa*. 4, 351–360. <https://doi.org/10.55678/mallomo.v4i2.1496>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>
- Ula, M., Fitri, Z., Fakhurrhazi, F., Akli, Z., Abidin, Z., & Saptari, M. A. (2024). PKM Pelatihan dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi dan Web Mobile untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 3(2), 460-471. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.20561>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.